



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Jl. Pulau Mendanau No. 2 Kelurahan Air Itam Pangkalpinang. 33418

Telp : 0717 9114210

Laman : www.babel.bawaslu.go.id

**SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG**

**Untuk Periode yang Berakhir Tanggal
31 DESEMBER 2020**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pangkalpinang, Januari 2021
Kepala Sekretariat



ROY M SIAGIAN
NIP. 19720312 199303 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Pernyataan Tanggung Jawab	4
Ringkasan Laporan Keuangan	5
I. Laporan Realisasi Anggaran	7
II. Neraca	8
III. Laporan Operasional	9
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	11
V. Catatan atas Laporan Keuangan	12
A. Penjelasan Umum	12
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	23
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	41
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	54
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	66
F. Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya	70
VI. Lampiran dan Daftar	75

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**
JALAN MENDANAU NO. 2 KELURAHAN AIR ITAM KEC. BUKIT INTAN
TELEPON (0717) 4261477. FAXIMILE (0717) 4261477

PERNYATAANTANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai. dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pangkalpinang, Januari 2021

Kepala Sekretariat.



ROY M SIAGIAN

NIP. 19720312 199303 1 002

Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020. Realisasi Pendapatan Negara adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2020 sebesar Rp50.691.368,00 Realisasi Belanja Negara pada TA 2020 adalah sebesar Rp41.458.555.659,00 atau mencapai 90 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp46.124.883.000,00

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2020. Nilai Aset per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp9.364.718.091,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp4.601.571.885,00 Aset Tetap (neto) sebesar Rp4.760521.206,00 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp2.625.000,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas TA 2020 sebesar Rp9.364.718.091,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp47.505.911,00 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional TA 2020 adalah sebesar Rp43.820.058.312,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional TA 2020 senilai Rp43.772.552.401,00 defisit Kegiatan Non Operasional TA 2020 sebesar Rp13.474.909,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp 43.786.027.310,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2020 sebesar Rp7.352.351.790,00 dikurangi dengan defisit LO senilai Rp43.786.027.310,00. dikurangi dengan koreksi lain-lain senilai Rp0,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp45.785.109.561,00 ditambah dengan kenaikan/penurunan ekuitas senilai

Rp1.999.082.251,00 sehingga Ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai Rp9.351.434.041,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas, Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2020 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020
DAN TAHUN 2019**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Ref	TA 2020		% thd Angg	TA 2019
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	50.691.368,00	0%	1.800.000,00
JUMLAH PENDAPATAN		-	50.691.368,00	0%	1.800.000,00
BELANJA	B.2				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3	6.032.068.000,00	5.233.674.822,00	87%	5.533.724.171,00
Belanja Barang	B.4	39.445.115.000,00	35.597.189.837,00	90%	45.043.468.609,00
Jumlah Belanja Operasi		45.477.183.000,00	40.830.864.659,00		50.577.192.780,00
Belanja Modal					
Belanja Modal	B.5	647.700.000,00	627.691.000,00	97%	986.876.720,00
Jumlah Belanja Modal		647.700.000,00	627.691.000,00		986.876.720,00
JUMLAH BELANJA		46.124.883.000,00	41.458.555.659,00	90%	51.564.069.500,00

II. NERACA

**SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NERACA
PER 31 DESEMBER 2020 DAN TAHUN 2019**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Ref	2020	2019
ASET			
ASET LANCAR			
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1	4.421.215.885,00	184.636.112,00
Belanja Dibayar di Muka (Prepaid)	C.2	180.356.000,00	1.390.781.333,00
Persediaan	C.3	0,00	69.666.850,00
Jumlah Aset Lancar		4.601.571.885,00	1.645.084.295,00
ASET TETAP			
Peralatan dan Mesin	C.4	10.136.683.860,00	9.701.643.860,00
Gedung dan Bangunan	C.5	94.308.000,00	0,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.6	8.000.000,00	8.000.000,00
Aset Tetap Lainnya	C.7	1.021.212.114,00	862.448.114,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.8	(6.499.682.768,00)	(4.861.538.707,00)
Jumlah Aset Tetap		4.760.521.206,00	5.710.553.267,00
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.9	27.000.000,00	27.000.000,00
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.10	(24.375.000,00)	(18.375.000,00)
Jumlah Aset Lainnya		2.625.000,00	8.625.000,00
JUMLAH ASET		9.364.718.091,00	7.364.262.562,00
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.11	13.284.050,00	11.910.772,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		13.284.050,00	11.910.772,00
JUMLAH KEWAJIBAN		13.284.050,00	11.910.772,00
EKUITAS			
EKUITAS			
Ekuitas	C.12	9.351.434.041,00	7.352.351.790,00
JUMLAH EKUITAS		9.351.434.041,00	7.352.351.790,00
JUMLAH EKUITAS		9.351.434.041,00	7.352.351.790,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		9.364.718.091,00	7.364.262.562,00

III. LAPORAN OPERASIONAL

**SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020
DAN 31 DESEMBER 2019**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Ref	31 Desember 2020	31 Desember 2019
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN	D.1		
Pendapatan Negara Bukan Pajak		47.505.911,00	1.902.223,00
JUMLAH PENDAPATAN		47.505.911,00	1.902.223,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	5.233.674.822,00	5.533.724.171,00
Beban Persediaan	D.3	381.370.882,00	267.259.150,00
Beban Barang dan Jasa	D.4	25.700.047.719,00	29.096.515.253,00
Beban Pemeliharaan	D.5	934.770.074,00	829.381.402,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6	9.926.050.754,00	16.195.348.784,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	1.644.144.061,00	1.688.419.862,00
JUMLAH BEBAN		43.820.058.312,00	53.610.648.622,00
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(43.772.552.401,00)	(53.608.746.399,00)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.8		
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		2.159.999,00	0,00
Jumlah Surplus (defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		2.159.999,00	0,00
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00
Jumlah Surplus (defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00

URAIAN	Ref	31 Desember 2019	31 Desember 2018
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan dari kegiatan Non Operasional Lainnya		62.906.300,00	16.430.100,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		78.541.208,00	4.677.110,00
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(15.634.908,00)	11.752.990,00
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(13.474.909,00)	11.752.990,00
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(43.786.027.310,00)	(53.596.993.409,00)
POS LUAR BIASA	D.9	0.00	0.00
SURPLUS/DEFISIT LO	D.10	(43.786.027.310,00)	(53.596.993.409,00)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Ref	2020	2019
EKUITAS AWAL	E.1	7.352.351.790,00	9.204.341.810
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(43.786.027.310,00)	(53.596.993.409)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI / KESALAHAN MENDASAR		0,00	0,00
KOREKSI YANG MENAMBAH / MENGURANGI EKUITAS	E.3	0,00	0,00
Penyesuaian Nilai Aset		0,00	0,00
Koreksi Nilai Persediaan		0,00	0,00
Koreksi atas Reklasifikasi		0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap		0,00	0,00
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		0,00	0,00
Koreksi Lain-Lain		0,00	0,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	45.785.109.561,00	51.745.003.389,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5	1.999.082.251,00	(1.851.990.020,00)
EKUITAS AKHIR	E.6	9.351.434.041,00	7.352.351.790,00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Dasar Hukum dan Profil Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

*Dasar Hukum
dan Profil
Entitas*

1) Dasar Hukum Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

1. Tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi adalah:

a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi yang meliputi:

1. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. dan pencalonan gubernur;
3. proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. dan calon gubernur;
4. penetapan calon gubernur;
5. pelaksanaan kampanye;
6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
7. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
8. pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
9. proses rekapitulasi suara dari seluruh kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang. Pemilu lanjutan. dan Pemilu susulan; dan
11. proses penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan pemilihan gubernur;

b. mengelola. memelihara. dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang

- disusun oleh Bawaslu Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu dan ANRI;
- c. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
 - d. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi untuk ditindaklanjuti;
 - e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
 - f. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat provinsi;
 - g. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi. sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;
 - h. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
 - i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.
1. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Bawaslu Provinsi dapat:
 - a. memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f; dan
 - b. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu.

2. Profil Sekretariat Bawaslu Provinsi

Sesuai dengan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. dan Sekretariat

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi dikepalai oleh Kepala Sekretariat yang bertanggungjawab kepada Bawaslu Provinsi.

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi membawahi 3 (tiga) Kepala Bagian. yaitu :

- a) Kepala Bagian Administrasi;
- b) Kepala Bagian Pengawasan dan Humas;
- c) Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran. Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan, Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui

pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2017 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang merupakan entitas pelaporan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Disamping itu. dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto. yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi. yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto. yaitu dengan membukukan penerimaan bruto. dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran. pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan

upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR). atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya. dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan

setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan. Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan). dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu

sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software/AplikasiKomputer	4
Lisensi	10

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga. Belanja yang Masih Harus Dibayar. Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu

lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan. *Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung* telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak 10 kali revisi dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh :

1. Revisi 1- REV POK : Penyesuaian akun belanja setelah penetapan pagu;
2. Revisi 2 - REV DIPA : *Refocusing* Anggaran APBN;
3. Revisi 3 – REV POK : Pemutakhiran akun dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 (S-369/PB/2020);
4. Revisi 4 – REV DIPA : Anggaran Tambahan Tahap 1;
5. Revisi 5 – REV DIPA : Input Anggaran Hibah 3 Kabupaten;
6. Revisi 6 – REV DIPA : Anggaran Tambahan Tahap 2;
7. Revisi 7 – REV DIPA : Penyesuaian Belanja Program/Kegiatan;
8. Revisi 8 – REV DIPA : Input Anggaran Hibah 1 Kabupaten;
9. Revisi 9 – REV DIPA : Penyesuaian Akun Belanja;
10. Revisi 10 – REV POK : Perbaikan Pagu Minus.

Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut :

Pagu Anggaran Belanja

URAIAN	2020	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Belanja :		
Belanja Pegawai	13.791.075.000,00	6.032.068.000,00
Belanja Barang	15.113.952.000,00	15.740.285.000,00
Belanja Modal	3.105.957.000,00	647.700.000,00
Jumlah Belanja	32.010.984.000,00	22.420.053.000,00
Hibah :		
Belanja Pegawai	-	-
Belanja Barang	-	23.704.830.000,00
Belanja Modal	-	-
Jumlah Hibah	-	23.704.830.000,00
Total	32.010.984.000,00	46.124.883.000,00

Realisasi

B.1 Pendapatan

Pendapatan

Rp50.691.368,00

Realisasi Pendapatan sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp50.691.368.00,00 Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2020

Uraian	2020	
	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0,00	2.159.999,00
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0,00	48.531.369,00
Total	0,00	50.691.368,00

Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2020 sebesar Rp50.691.368,00 merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diperoleh dari :

1. Pendapatan dari pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp2.159.999,00 dengan no NTPN 593382G4UKUTG7GQ Tanggal 18 November 2020 Pendapatan tersebut merupakan pendapatan yang berasal dari hasil lelang Sisa Buku Saksi Parpol.
2. Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (jasa giro) sebesar Rp48.531.369,00 merupakan jasa giro yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten atas rekening yang menampung dana hibah kegiatan pengawasan tahapan pemilihan kepala daerah tahun 2020 yang telah seluruhnya disetor ke kas negara pada tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut :

*Rincian Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) per 31
Desember 2020*

No	Kabupaten	NTPN	Tanggal Setor	Nominal (Rp)	Jumlah Per Kabupaten (RP)
1	Kabupaten Bangka Selatan	0F6878N3DE4M26S7	17-Feb-20	754.357,00	41.493.596,00
2	Kabupaten Bangka Selatan	278B51JNEPKDE8V5	9-Mar-20	449.692,00	
3	Kabupaten Bangka Selatan	DE79F61QTUJO2QSE	22-Apr-20	3.083.590,00	
4	Kabupaten Bangka Selatan	4E7081JNEPNQ1S3B	22-Apr-20	2.395.678,00	
5	Kabupaten Bangka Selatan	4AA7C1JNEPT5QOB8	9-Jun-20	1.989.868,00	
6	Kabupaten Bangka Selatan	AEFFD61QTUP3RNO5	9-Jun-20	2.130.081,00	
7	Kabupaten Bangka Selatan	A0E011JNEQ697B0T	10-Sep-20	15.919.708,00	
8	Kabupaten Bangka Selatan	16E2B3CIEFJU7P03	7-Dec-20	14.770.622,00	
9	Kabupaten Bangka Tengah	5C4D33CIEEJFFVRF	17-Jan-20	874.587,00	6.878.745,00
10	Kabupaten Bangka Tengah	D0C637QLTJULUDNU	30-Jun-20	1.423.340,00	
11	Kabupaten Bangka Tengah	B4D767QLTJULUF7E	30-Jun-20	4.580.818,00	
12	Kabupaten Belitung Timur	DB1888N3DE4LUUI3	17-Feb-20	159.028,00	159.028,00
Total					48.531.369,00

Selanjutnya realisasi pendapatan sampai dengan 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 terdapat kenaikan sebesar 2.716.19 persen dengan rincian sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Pendapatan
Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi		%
	31 Desember 2020	31 Desember 2019	
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	2.159.999,00	0,00	0,00
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	48.531.369,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu		1.800.000,00	0,00
Total	50,691.368,00	1.800.000,00	2716,19

Realisasi Belanja B.2 Belanja

Negara

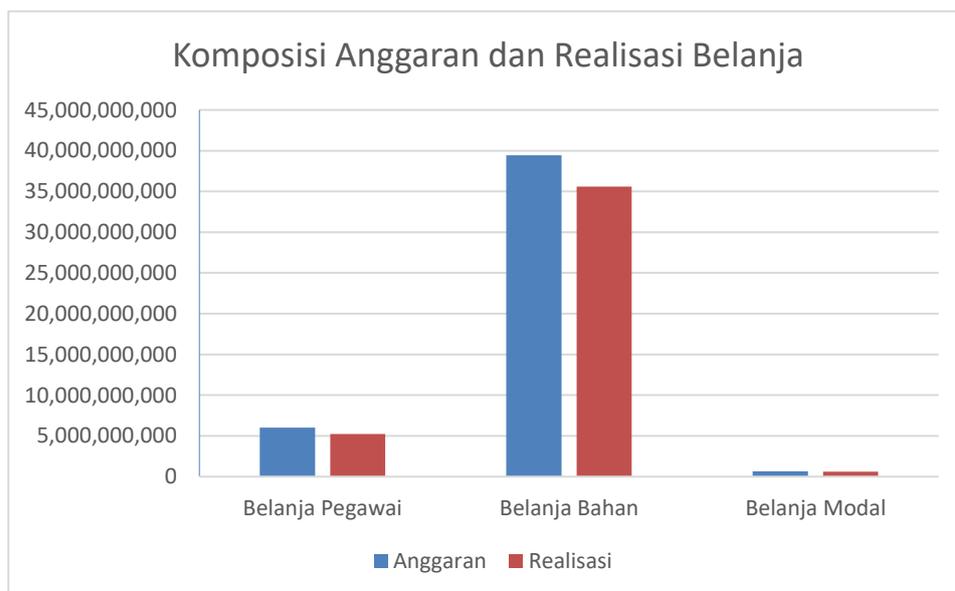
**Rp41.458.555.659
,00**

Realisasi Belanja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp41.458.555.659,00 atau 89.88 persen dari anggaran belanja sebesar Rp46.124.883.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Desember 2020

Uraian	2020		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Real Angg.
Belanja Pegawai	6.032.068.000,00	5.235.289.348,00	86.79
Belanja Barang	39.445.115.000,00	35.603.424.136,00	90.26
Belanja Modal	647.700.000,00	627.691.000,00	96.91
Total Belanja Kotor	46.124.883.000,00	41.466.404.484,00	89.90
Pengembalian Belanja	0,00	7.848.825,00	-
Total	46.124.883.000,00	41.458.555.659,00	89.88

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut :



Realisasi belanja berdasarkan program sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

Realisasi Belanja berdasarkan Program sebagai berikut :

Program	2020		%
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu			
Rupiah Murni	22.420.053.000,00	20.104.111.432,00	90
Hibah Langsung Dalam Negeri	23.704.830.000,00	21.354.444.227,00	90
Total	46.124.883.000,00	41.458.555.659,00	90

Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 19.60 persen dibandingkan dengan 31 Desember 2019 hal ini disebabkan antara lain:

1. Tidak adanya realisasi THR untuk Kepala Sekretariat. Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Adanya perubahan kebijakan pemerintah dalam pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil yaitu Tidak adanya realisasi pencairan Tunjangan Kinerja THR dan Gaji ke-13 untuk PNS;
3. Pada tahun 2019 adanya pengawasan tahapan pemilu legislatif dan presiden sedangkan pada tahun 2020 hanya ada pelaksanaan PILKADA 4 Kabupaten;
4. Adanya pemangkasan anggaran terkait pandemi Covid-19.

Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2020 dan Tahun 2021

Uraian	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Pegawai	5.233.674.822,00	5.533.724.171,00	(5,42)
Belanja Barang	35.597.189.837,00	45.043.468.609,00	(20,97)
Belanja Modal	627.691.000,00	986.876.720,00	(36,40)
Total	41.458.555.659,00	51.564.069.500,00	(19,60)

Rekapitulasi belanja negara sebesar Rp41.458.555.659,00 merupakan hasil pengurangan dari realisasi belanja bruto sebesar Rp41.466.404.484,00 dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp7.848.825.00,00 Pengembalian belanja sebesar Rp7.848.825,00 merupakan pengembalian belanja tahun anggaran berjalan yang terdiri dari :

1. Belanja Pegawai sebesar Rp1.614.526,00
2. Belanja Barang sebesar Rp6.234.299,00

Jumlah Rp 7.848.825,00

Rincian pengembalian belanja sebagai berikut :

No	Kode	Uraian	No NTPN/SP2D	Tanggal Setor	Jumlah (Rp)
1	521211	Belanja Bahan	CFAC27QLTJNSL884	7-Apr-20	2.000.000,00
2	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	5681C6U8DPC9HFHR	30-Jun-20	310.000,00
3	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	122818N3DEJID7T7	13-Jul-20	400.000,00
4	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	46E717QLTK9TDGN4	7-Oct-20	39.999,00
			59E070N9UVTEKJGG	29-Dec-20	1.998.300,00
			AA3511JNEQFS2DK9	30-Dec-20	560.000,00
			11AA48N3DF2VAESH	30-Dec-20	926.000,00
5	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	08E018N3DEVE387H	11-Nov-20	1.244.000,00
6	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	200151501001900	29-Mei-20	526,00
7	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	200151501001900	29-Mei-20	370.000,00
Total					7.848.825,00

Belanja Pegawai
Rp5.233.674.822,
00

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp5.233.674.822,00 atau 86,76 persen dan Anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp6.032.068.00,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai
per 31 Desember 2020*

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Naik (Turun) %
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	110.9327.000,00	722.893.338,00	65,17
Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	4.180.500.000,00	4.039.129.700,00	96,62
Beban Uang Lembur	258.811.000,00	38.090.000,00	14,72
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	483.430.000,00	435.176.310,00	90,02
Jumlah Belanja Kotor	6.032.068.000,00	5.235.289.348,00	86,79
Pengembalian Belanja Pegawai	0,00	1.614.526,00	0,00
Jumlah Belanja	6.032.068.000,00	5.233.674.822,00	86,76

Relisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp5.233.674.822,00 dan Rp5.533.724.171,00 atau terjadi penurunan sebesar 5,42 persen. Penurunan Belanja pegawai ini disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :

1. Tidak adanya realisasi THR untuk Kepala Sekretariat. Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Tidak adanya realisasi pencairan Tunjangan Kinerja THR dan Gaji ke-13 untuk seluruh PNS;
3. Adanya penurunan besaran THR bagi Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.

Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI TA 2020 (Rp)	REALISASI TA 2019 (Rp)	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	722.893.338,00	410.737.977,00	76,00
Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	4.039.129.700,00	4.729.235.600,00	(14,59)
Beban Uang Lembur	38.090.000,00	46.478.800,00	(18,05)
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	435.176.310,00	347.359.650,00	25,28
Jumlah Belanja Kotor	5.235.289.348,00	5.533.812.027,00	(5,39)
Pengembalian Belanja Pegawai	1.614.526,00	87.856,00	1.737,70
Jumlah Belanja	5.233.674.822,00	5.533.724.171,00	(5,42)

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2020 sebesar Rp5.233.674.822,00 dipergunakan untuk :

1. Pembayaran Gaji PNS dari bulan Januari s.d. Desember 2020 sebanyak 12 bulan;
2. Pembayaran tunjangan kinerja PNS bulan Januari s.d. Desember 2020 sebanyak 12 bulan;
3. Pembayaran Gaji Ke-13 untuk PNS dan Pegawai Teknis sebanyak 1 kali;
4. Pembayaran THR untuk PNS. Pegawai Teknis. Pramu Bakti dan Penjaga Malam sebanyak 1 kali;
5. Pembayaran Uang Kehormatan Ketua. Anggota Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota sebanyak 12 Bulan;
6. Pembayaran THR Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 1 bulan;
7. Pembayaran Lembur.

Belanja Pegawai sebesar Rp5.233.674.822,00 merupakan hasil pengurangan dari Realisasi Belanja Pegawai Bruto sebesar Rp5.235.289.348,00 dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp1.614.526.- dengan rincian sebagai berikut :

No	Kode	Uraian	No NTPN/SP2D	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	200151501001900	29-Mei-20	526,00
2	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	200151501001900	29-Mei-20	370.000,00
4	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	08E018N3DEVE387H	11-Nov-20	1.244.000,00
Total					1.614.526,00

Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS dan Belanja Tunjangan Umum PNS Sebesar masing-masing Rp526,00 dan Rp370.000,00 merupakan potongan SPM.

Belanja Barang

**Rp35.597.189.837
,00**

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp35.597.189.837,00 atau 90.24 persen dari anggaran Belanja Barang sebesar Rp39.445.115.000,00 Rincian anggaran dan realisasi belanja barang per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2020

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Barang Operasional	16.172.305.000,00	15.267.841.841,00	94,41
Belanja Barang Non Operasional	6.178.053.000,00	5.423.387.360,00	87,78
Belanja Barang Persediaan	285.589.000,00	263.119.901,00	92,13
Belanja Jasa	4.527.008.000,00	3.784.729.907,00	83,60
Belanja Pemeliharaan	1.050.917.000,00	934.770.074,00	88,95
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	11.231.243.000,00	9.929.575.053,00	88,41
Jumlah Belanja Kotor	39.445.115.000,00	35.603.424.136,00	90,26
Pengembalian Belanja	0,00	6.234.299,00	0,00
Total	39.445.115.000,00	35.597.189.837,00	90,24

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp35.597.189.837,00 dan Rp45.043.468.609,00 Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 20.97 persen dari Realisasi Belanja Barang Tahun 2019 disebabkan oleh :

1. Pada tahun 2019 dilaksanakan Pemilihan Umum sedangkan di tahun 2020 hanya ada pelaksanaan PILKADA Bupati dan wakil Bupati pada 4 Kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Adanya pandemic COVID-19 yang menyebabkan turunnya intensitas pekerjaan dan tertundanya pelaksanaan PILKADA yang semula akan dilaksanakan pungut hitung di bulan September menjadi bulan desember tahun 2020.
3. Adanya pembatasan pelaksanaan kegiatan oleh tim gugus COVID-19 sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan tatap muka. konsultasi. pembinaan. supervisi dan monitoring evaluasi dan kegiatan dilaksanakan secara daring yang memanfaatkan teknologi informasi.

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2020 sebesar Rp35.597.189.837,00 terdiri dari realisasi Belanja Barang yang bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp14.242.745.610,00 dan Dana Hibah sebesar Rp21.354.444.227,00 dengan rincian sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI		% Naik (Turun)
	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)	
Belanja Barang Operasional	15.267.841.841,00	14.807.850.977,00	3,11
Belanja Barang Non Operasional	5.423.387.360,00	7.330.086.850,00	(26,01)
Belanja Barang Persediaan	263.119.901,00	257.537.660,00	2,17
Belanja Jasa	3.784.729.907,00	5.654.817.140,00	(33,07)
Belanja Pemeliharaan	934.770.074,00	829.381.402,00	12,71
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	9.929.575.053,00	16.298.310.095,00	(39,08)
Jumlah Belanja Kotor	35.603.424.136,00	45.177.984.124,00	(21,19)
Pengembalian Belanja	6.234.299,00	134.515.515,00	(95,37)
Total	35.597.189.837,00	45.043.468.609,00	(20,97)

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2020 sebesar Rp35.597.189.837,00 berasal dari sumber dana rupiah murni (RM) dan hibah dalam negeri (HDN) masing-masing sebesar Rp14.242.745.610,00 dan Rp21.354.444.227,00

B.4.1 Belanja Barang (RM)

Realisasi Belanja Barang (RM) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp14.242.745.610,00 dan Rp45.043.468.609,00.

Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI		% Naik (Turun)
	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)	
Belanja Barang Operasional	7.976.740.162,00	14.807.210.977,00	(46)
Belanja Barang Non Operasional	394.544.650,00	7.188.267.750,00	(95)
Belanja Barang Persediaan	263.119.901,00	257.537.660,00	2
Belanja Jasa	1.804.061.772	5.096.797.140	(65)
Belanja Pemeliharaan	891.484.074	829.381.402	7
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2.919.029.350	15.523.086.084	(81)
Jumlah Belanja Kotor	14.248.979.909	43.702.281.013	(67)
Pengembalian Belanja	6.234.299	134.515.515	(95)
Total	14.242.745.610	45.043.468.609	(68)

Realisasi belanja barang (RM) sebesar Rp14.242.745.620,00 dipergunakan untuk :

1. Belanja Barang Operasional digunakan untuk belanja Keperluan Perkantoran (belanja ATK. Komputer Supply. kebutuhan operasional kantor lainnya dan honor PPNPN). Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat. belanja Honor Operasional Satuan Kerja. Belanja Barang Operasional Lainnya dan Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi
2. Belanja Barang Non Operasional digunakan untuk belanja Belanja Bahan. Belanja Honor Output Kegiatan. Belanja Barang Non Operasional Lainnya dan Belanja Barang Non operasional – Penanganan Pandemi Belanja Sewa adalah belanja untuk keperluan sewa kendaraan kabupaten/kota. sewa gedung Kabupaten/Kota dan Sewa Gedung Panwascam;
3. Belanja Barang Persediaan digunakan untuk Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi dan Belanja Barang Persediaan – Penanganan Pandemi Covid-19 Belanja Perjalanan Dinas Biasa adalah belanja perjalanan dinas dalam rangka undangan. fasilitasi. Koordinasi. Pelaporan dan Monev/Supervisi oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
4. Belanja Jasa digunakan untuk Belanja Langganan Listrik. Belanja Langganan Telpon. Belanja Langganan Air. Belanja Langganan

Daya dan Jasa Lainnya Belanja Jasa Konsultan. Belanja Sewa. Belanja Jasa Profesi. Belanja Jasa Lainnya dan Belanja Jasa – Penanganan Pandemi Covid-19 Belanja perjalanan dinas Paket meeting dalam kota adalah belanja dalam rangka pelaksanaan rapat/pertemuan di luar kantor yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota;

5. Belanja Pemeliharaan dipergunakan untuk Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan dan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin adalah belanja atas perbaikan barang inventaris kantor. BBM operasional kendaraan dinas Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/kota dan Pembayaran Pajak atas kendaraan dinas;
6. Belanja Perjalanan Dalam Negeri dipergunakan untuk Belanja Perjalanan Biasa. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota dan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota.

Realisasi belanja barang (RM) sebesar Rp14.242.745.610,00 merupakan hasil pengurangan dari Reallisasi Belanja Barang Bruto sebesar Rp14.248.979.909,00 dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp6.234.299,00. Adapun rincian pengembalian belanja barang sebagai berikut :

*Rincian Pengembalian Belanja Barang Rupiah Murni per 31 Desember
2020*

No	Kode	Uraian	No NTPN	Tanggal Setor	Jumlah (Rp)
1	521211	Belanja Bahan	CFAC27QLTJNSL884	7-Apr-20	2.000.000,00
2	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	5681C6U8DPC9HFHR	30-Jun-20	310.000,00
3	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	122818N3DEJID7T7	13-Jul-20	400.000,00
4	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	46E717QLTK9TDGN4	7-Oct-20	39.999,00
			59E070N9UVTEKJGG	29-Dec-20	1.998.300,00
			AA3511JNEQFS2DK9	30-Dec-20	560.000,00
			11AA48N3DF2VAESH	30-Dec-20	926.000,00
Total					6.234.299,00

Dari Realisais Belanja Barang (RM) sebesar Rp14.242.745.610,00 terdapat realisasi belanja yang digunakan dalam rangka penanganan pandemic COVID-19 senilai Rp882.108.070,00. Belanja Barang dalam rangka penanganan COVID-19 dipergunakan untuk:

1. Belanja APD berupa masker, Handsanitizer, face shiled, sarung tangan dan penambah daya tahan tubuh;
2. Pengadaan lisensi aplikasi *video conference* sebanyak satu akun sampai dengan bulan desember 2020;
3. Biaya Komunikasi dalam bentuk pulsa/paket data internet untuk kegiatan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) daring;
4. Pelaksanaan rapid test yang menggunakan pihak ketiga;
5. Pengadaan tempat cuci tangan.

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 68 persen dari Realisasi Belanja Barang Tahun 2019 hal ini disebabkan pada tahun 2019 diselenggarakan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif sedangkan di tahun 2020 hanya ada pelaksanaan PILKADA 4 Kabupaten yang realisasinya dari Dana Hibah dan adanya Pandemi COVID-19 sehingga adanya pembatasan kegiatan. Realisasi Dana Hibah PILKADA untuk 4 Kabupaten Kota adalah sebagai berikut :

Perbandingan Belanja Barang Dana Hibah 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI		% Naik (Turun)
	31 Desember 2020	31 Desember 2019	
Belanja Barang Operasional	7.291.101.679,00	640.000,00	1.139.135
Belanja Barang Non Operasional	5.028.842.710,00	141.819.100,00	3.446
Belanja Barang Persediaan	0,00	0,00	-
Belanja Jasa	1.980.668.135,00	558.020.000,00	255
Belanja Pemeliharaan	43.286.000,00	0,00	-
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	7.010.545.703,00	775.224.011,00	804
Total	21.354.444.227,00	1.475.703.111,00	1.347

B.4.2 Belanja Barang (HDN)

Realisasi Belanja Barang (HDN) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp21.354.444.227,00 dan Rp1.475.703.111,00.

Rincian Realisasi Belanja Barang (HDN) per 31 Desember 2020

URAIAN	REALISASI		% Naik (Turun)
	31 Desember 2020	31 Desember 2019	
Belanja Barang Operasional	7.291.101.679,00	640.000,00	1.139.135
Belanja Barang Non Operasional	5.028.842.710,00	141.819.100,00	3.446
Belanja Jasa	1.980.668.135,00	558.020.000,00	255
Belanja Pemeliharaan	43.286.000,00	0,00	-
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	7.010.545.703,00	775.224.011,00	804
Total	21.354.444.227,00	1.475.703.111,00	1.347

Realisasi belanja barang (HDN) sebesar Rp21.354.444.227,00 dipergunakan untuk pengawasan tahapan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Tahun 2020.

Dari realisasi belanja barang (HDN) sebesar Rp21.354.444.227,00 terdapat realisasi belanja yang digunakan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dengan akun Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi COVID-19 (521131). Belanja Barang Non Operasional – Penanganan Pandemi COVID-19 (521241) dan Belanja Jasa – Penanganan Pandemi COVID-19 (522192) senilai Rp43.773.299,00 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Realisasi Belanja Barang (HDN) dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19 per 31 Desember 2020

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi COVID-19	31.272.299,00
2	Belanja Barang Non Operasional – Penanganan Pandemi COVID-19	9.411.000,00
3	Belanja Jasa – Penanganan Pandemi COVID-19	3.090.000,00
	Total	43.773.299,00

Belanja Barang dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 yang bersumber dari hibah dalam negeri dipergunakan untuk pengadaan masker/*hand sanitizer*, Vitamin, penambah daya tahan tubuh dan Pembayaran biaya penyemprotan disinfektan yang menggunakan pihak ketiga.

Belanja Modal
Rp627.691.000,0
0

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp627.691.000,00 atau 96,91 persen dari anggaran belanja sebesar Rp647.700.000,00. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Rincian Belanja Modal per 31 Desember 2020

URAIAN	REALISASI		% Naik (Turun)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	377.220.000,00	359.619.000,00	95,33
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	95.480.000,00	94.308.000,00	98,77
Belanja Modal Lainnya	175.000.000,00	173.764.000,00	99,29
Jumlah Belanja Kotor	647.700.000,00	627.691.000,00	96,91
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Total	647.700.000,00	627.691.000,00	96,91

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2020 sebesar Rp627.691.000,00 seluruhnya berasal dari sumber dana rupiah murni. Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp627.691.000,00 dan Rp986.876.720,00. Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 36,40 persen jika dibandingkan dengan Realisasi per 31 Desember 2019 hal ini karena adanya pemotongan anggaran terkait pandemi Covid-19.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	359.619.000,00	772.507.720,00	(53,45)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	94.308.000,00	0,00	0,00
Belanja Modal Lainnya	173.764.000,00	214.369.000,00	(18,94)
Jumlah Belanja	627.691.000,00	986.876.720,00	(36,40)

B.5.1 Belanja Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp359.619.000,00 dan Rp772.507.720,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 53.45 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

URAIAN	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	359.619.000,00	772.507.720,00	(53,45)
Jumlah Belanja Kotor	359.619.000,00	772.507.720,00	(53,45)
Pengembalian	0,00	0,00	0,00
Total	359.619.000,00	772.507.720,00	(53,45)

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp359.619.000,00 terdiri atas :

Rincian Realisasi Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2020

No	Nama	Unit	Jumlah (Rp)
1	AC split	16	81.063.000,00
2	Sice	3	28.100.000,00
3	Video Conference	1	24.530.000,00
4	Filing Cabinet Besi	2	6.050.000,00
5	LCD Projector/Infocus	1	6.850.000,00
6	Kursi Besi/Metal	81	123.001.000,00
7	Meja Rapat	11	11.495.000,00
8	Televisi	1	8.800.000,00
9	Handycam	3	34.450.000,00
10	Microphone/Boom Stand	1	2.850.000,00
11	Tripod Camera	2	5.800.000,00
12	Facsimile	1	2.970.000,00
13	Printer	4	10.260.000,00
14	Thermogun	8	13.400.000,00
Total			359.619.000,00

Dari Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp359.619.000,00 terdapat realisasi belanja dalam rangka penanganan pandemic COVID-19 sebesar Rp 13.400.000,00 yang belum menggunakan akun khusus COVID-19. belanja tersebut untuk pengadaan 8 unit thermogun yang memiliki masa manfaat lebih dari setahun dan nilainya memenuhi minimum kapitalisasi peralatan dan mesin.

B.5.2 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp94.308.000,00 dan Rp0,00.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Realisasi		% Naik (Turun)
	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	94.308.000,00	0,00	0,00
Total	94.308.000,00	0,00	0,00

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember sebesar Rp94.308.000,00 merupakan pembuatan Pagar semi permanen untuk Hibah Tanah yang berlokasi di Kabupaten Bangka Tengah.

B.5.3 Realisasi Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Realisasi		% Naik (Turun)
	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)	
Belanja Modal Lainnya	173.764.000,00	214.369.000,00	(18,94)
Total	173.764.000,00	214.369.000,00	(18,94)

Belanja modal lainnya sebesar Rp173.764.000,00 terdiri atas :

1. Belanja Partisi Ruangan dan Renovasi Lahan Parkir Bawaslu Kabupaten Belitung Timur sebesar Rp59.950.000,00;
2. Belanja Renovasi Ruang Kerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sebesar Rp98.814.000,00;
3. Belanja Konsultan Pembuatan Buku Kinerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sebesar Rp15.000.000,00.

PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas Lainnya dan Setara Kas Lainnya
Rp4.421.215.885,00

C.1 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2020 dan Tahun 2019 masing-masing sebesar Rp4.421.215.885,00 dan Rp184.636.112,00 Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas 31 Desember 2020 dan Tahun 2019

Keterangan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	876.765,00	1.902.223,00
Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah	4.420.339.120,00	182.733.889,00
Total	4.421.215.885,00	184.636.112,00

1. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp876.765,00 merupakan Jasa giro Kabupaten Bangka Selatan bulan Desember yang belum disetor pada tahun 2020 dan disetorkan pada tanggal 5 Januari 2021 dengan nomer NTPN 1BF4C7QLTSP32E4G.
2. Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah sebesar Rp4.420.339.120,00 merupakan saldo akhir dana hibah yang berada pada rekening koran tahun 2020 yang akan dipergunakan di Tahun 2021 pada Tahapan Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa Hasil Pemilihan jika ada untuk PILKADA 4 Kabupaten pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember

Kabupaten	Jumlah (Rp)
Bawaslu Kabupaten Bangka Barat	952.996.877,00
Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan	1.329.653.420,00
Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah	1.015.371.318,00
Baswaslu Kabupaten Belitung Timur	1.122.317.505,00
Total	4.420.339.120 ,00

Kas Lainnya di K/L dari Hibah 2020 sebesar Rp4.420.339.120,00 merupakan saldo kas hibah tahun 2019 sebesar Rp182.733.889,00 ditambah Kas Hibah yang diterima pada tahun 2020 sebesar Rp25.592.049.458,00 dan telah dilakukan pengesahan penggunaan hibah pada tahun 2020 sebesar Rp21.354.444.227,00 dengan rincian sebagai berikut :

Saldo Dana Hibah Sampai dengan 31 Desember 2020

No	Kabupaten	NPHD	Penerimaan Hibah 2019 (Rp)	SP2HL 2019 (Rp)	Saldo Awal 2020 (Rp)	Penerimaan Hibah 2020 (Rp)	SP2HL 2020 (Rp)	Saldo Rekening (Rp)
1	Bawaslu Kab. Bangka Barat	5.756.190.000,00	300.000.000,00	206.670.000,00	93.330.000,00	5.456.190.000,00	4.596.523.123,00	952.996.877,00
2	Bawaslu Kab. Bangka Tengah	8.344.200.000,00	544.200.000,00	520.312.023,00	23.887.977,00	7.800.000.000,00	6.808.516.659,00	1.015.371.318,00
3	Bawaslu Kab. Bangka Selatan	7.215.020.000,00	575.916.000,00	526.371.500,00	49.544.500,00	6.639.104.000,00	5.358.985.080,00	1.329.653.420,00
4	Bawaslu Kab. Belitung Timur	5.935.076.458,00	238.321.000,00	222.349.588,00	15.971.412,00	5.696.755.458,00	4.580.409.365,00	1.122.317.505,00
	Total	27.250.486.458,00	1.658.437.000,00	1.475.703.111,00	182.733.889,00	25.592.049.458,00	21.354.444.227,00	4.420.339.120,00

Belanja dibayar dimuka
Rp180.356.000,00

C.3 Belanja dibayar dimuka

Saldo belanja dibayar dimuka per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp180.356.000,00 dan Rp1.390.781.333,00. Belanja dibayar dimuka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang atau jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja dibayar dimuka adalah sebagai berikut :

Rincian Belanja di bayar dimuka per 31 Desember 2020

Jenis	TH 2020 (Rp)	TH 2019 (Rp)
Belanja Sewa Kendaraan	0,00	1.035.958.000,00
Belanja Sewa Peralatan dan Meubeulair	128.956.000,00	218.240.000,00
Belanja Sewa Gedung	51.400.000,00	136.583.333,00
Total	180.356.000,00	1.390.781.333,00

1. Belanja Sewa Peralatan dan Meubeulair sebesar Rp128.956.000,00 ini merupakan Sewa peralatan dan Meubeulair Panwascam Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan sebesar Rp39.680.000,00 dan Sewa peralatan dan Meubeulair Panwascam Bawaslu Kabupaten Belitung Timur sebesar Rp89.276.000,00
2. Belanja Sewa Gedung Sebesar Rp51.400.000,00 merupakan belanja sewa gedung Panwascam Bawaslu Kab. Bangka Selatan sebesar Rp24.900.000,00 dan Sewa Gedung Panwascam Bawaslu Kab. Belitung Timur Rp 26.500.000,00

Rincian atas Belanja Dibayar Dimuka disajikan pada Lampiran I.

*Persediaan
Rp0,00*

C.4 Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp69.666.850,00. Atas saldo Persediaan tahun 2020 berikut mutasinya :

Mutasi Nilai Persediaan per 31 Desember 2020

Saldo per 31 Desember 2019	69.666.850,00
Mutasi tambah :	
Pembelian	263.119.901,00
Hibah (Masuk)	109.442.039,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	17.683.300,00
Mutasi Kurang :	
Pemakaian	(381.370.882,00)
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	(8.874.358,00)
Barang Usang	(69.666.850,00)
Saldo per 31 Desember 2020	0,00

Penjelasan Mutasi :

1. Pembelian sebesar Rp263.119.901,00 merupakan pembelian yang diperoleh dari akun :

Pembelian Persediaan Berdasarkan Akun

No	Kode	Nama	Jumlah (Rp)
1	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	252.365.901,00
2	521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	10.754.000,00
Total			263.119.901,00

2. Hibah (Masuk) sebesar Rp109.442.039,00 merupakan hibah APD dari Pemerintah Daerah dalam rangka penanganan COVID-19 yang telah disahkan dengan rincian sebagai berikut :

Hibah Masuk Persediaan

Kabupaten	Nama Barang	Jumlah (Rp)
Bangka Selatan	Masker Jenis Tali	2.168.000,00
	Asam Askorbat (Vitamin C) tablet 50 mg	1.100.000,00
	Hand Sanitizer	10.000.000,00
	Handscoon Steril 7.5	4.831.200,00

	Baju hazmat/coverall	11.000.000,00
Bangka Barat	Masker	3.740.000,00
	sarung tangan	790.400,00
	Vitamin	1.977.000,00
	Hand Sanitizer	779.418,00
	Masker	2.330.000,00
	Face Shield	8.650.000,00
	sarung tangan	6.000.000,00
	Hand Sanitizer	40.775.000,00
	Sarung Tangan	2.840.000,00
Bangka Tengah	Hand. Masker Medis. Sarung Tangan dan Vitamin	3.111.021,00
	Handsantizer. Sarung Tangan. Masker. dan Face Shield	9.350.000,00
Total		109.442.039,00

Peralatan dan

Mesin

Rp10.136.683.86

0,00

C.5 Peralatan dan Mesin

Nilai Perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp10.136.683.860,00 dan Rp9.701.643.860,00. Adapun saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 2019

Nama	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Alat Bantu	97.001.000,00	97.001.000,00
Alat Angkutan Darat Bermotor	3.231.399.550,00	3.197.126.550,00
Alat Kantor	948.381.500,00	971.481.500,00
Alat Rumah Tangga	2.545.424.220,00	2.247.565.220,00
Alat Studio	442.110.400,00	408.930.400,00
Alat Komunikasi	19.254.300,00	16.284.300,00
Alat Kedokteran	43.598.000,00	0,00
Komputer Unit	2.155.269.590,00	2.155.269.590,00
Peralatan Komputer	618.245.300,00	607.985.300,00
Total	10.136.683.860,00	9.701.643.860,00

Rincian Peralatan dan Mesin sebesar Rp10.136.683.860,00 secara lengkap disajikan pada lampiran II.

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	9.701.643.860,00
Mutasi tambah:	
Pembelian	359.619.000,00
Perolehan Lainnya	45.223.000,00
Hibah Masuk	30.198.000,00
Mutasi kurang:	
	0,00
Saldo per 31 Desember 2020	10.136.683.860,00
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2020	(6.507.559.687,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2020	3.659.564.173,00

Penjelasan Mutasi :

Mutasi Tambah

1. Pembelian sebesar Rp359.619.000,00 dipergunakan untuk pembelian :

Rincian Pembelian Peralatan dan Mesin

No	Nama	Unit	Jumlah (Rp)
1	AC split	16	81.063.000,00
2	Sice	3	28.100.000,00
3	Video Conference	1	24.530.000,00
4	Filing Cabinet Besi	2	6.050.000,00
5	LCD Projector/Infocus	1	6.850.000,00
6	Kursi Besi/Metal	81	123.001.000,00
7	Meja Rapat	11	11.495.000,00
8	Televisi	1	8.800.000,00
9	Handycam	3	34.450.000,00
10	Microphone/Boom Stand	1	2.850.000,00

11	Tripod Camera	2	5.800.000,00
12	Facsimile	1	2.970.000,00
13	Printer	4	10.260.000,00
14	Thermogun	8	13.400.000,00
Total			359.619.000,00

2. Perolehan Lainnya Sebesar Rp45.223.000,00 merupakan hasil dari reward Bank yang diterima di Tahun 2020 terdiri dari :

Perolehan Lainnya Peralatan dan Mesin

No	Kabupaten	Uraian	Unit	Jumlah (Rp)
1	Bangka Barat	Sepeda Motor	1	17.223.000,00
2	Bangka Tengah	Sepeda Motor	1	17.050.000,00
3	Belitung Timur	AC	3	10.950.000,00
Total				45.223.000,00

3. Hibah Masuk sebesar Rp30.198.000,00 merupakan Penerimaan Hibah Peralatan dan Mesin berupa Thermogun dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Hibah Peralatan dan Mesin per 31 Desember

No	Kabupaten	Uraian	Unit	Jumlah (Rp)
1	Bawaslu Kab. Bangka Selatan	Thermogun	9	19.998.000,00
2	Bawaslu Kab. Bangaka Tengah	Thermogun	6	10.200.000,00
Total				30.198.000,00

*Gedung dan
Bangunan
Rp94.308.000,00*

C.5 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar masing-masing Rp94.308.000,00 dan Rp0,00. Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2020 sebesar Rp94.308.000,00 merupakan Pagar Semi Permanen untuk Tanah yang berlokasi di Kabupaten Bangka Tengah dengan rincian sebagai berikut :

*Perbandingan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan TA
2019*

No	Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1	Pagar Semi Permanen	94.308.000,00	0,00
Total		94.308.000,00	0,00

Adapun saldo mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	0,00
Mutasi tambah:	
Pembelian	94.308.000,00
Mutasi kurang:	
	0,00
Saldo per 31 Desember 2020	94.308.000,00
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2020	(943.080,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2020	93.364.920,00

Penjelasan Mutasi :

Pembelian Sebesar Rp94.308.000,00 diperoleh dari belanja modal Gedung dan Bangunan berupa Pemagaran Semi Permanen untuk Tanah di Kabupaten Bangka Tengah.

*Jalan.Jaringan
dan Irigasi
Rp8.000.000,00*

C.5 Jalan. Irigasi. dan Jaringan

Jalan. Irigasi. dan Jaringan per 31 Desember 2020 dan Tahun 2019 adalah masing-masing sebesar Rp8.000.000,00 dan Rp8.000.000,00 Saldo Jalan. Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 sebesar Rp8.000.000,00 terdiri dari :

*Perbandingan Jalan. Irigasi. dan Jaringan per 31 Desember 2020 dan
TA 2019*

No	Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1	Instalasi Lain (Kabel. TP Link dan alan pendukung lainnya)	8.000.000,00	8.000.000,00
Total		8.000.000,00	8.000.000,00

Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas Jalan. Irigasi dan Jaringan ini untuk 31 Desember 2020. sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Rincian Mutasi Jalan. Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	8.000.000,00
Mutasi tambah:	0,00
Mutasi kurang:	0,00
Saldo per 31 Desember 2020	8.000.000,00
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2020	(6.400.001,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2020	1.599.999,00

Aset Tetap

Lainnya

Rp1.021.212.114,00

C.7 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dan Tahun 2019 adalah Rp1.021.212.114,00 dan Rp862.448.114,00. Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.021.212.114,00 terdiri dari :

Perbandingan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019

No	Nama	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1	Gedung dan Bangunan dalam Renovasi	1.021.212.114,00	862.448.114,00
Total		1.021.212.114,00	862.448.114,00

Saldo Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2020

No	Nama Barang	Identitas ATR	Tahun Perolehan	Harga Perolehan (Rp)
1	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	Parkir Kendaraan	2014	62.707.114,00
2	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	Rehap Atap Gedung	2016	175.200.000,00
3	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	Ruang SentraGakkumdu	2016	116.210.000,00
4	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	Ruang Arsip	2016	95.700.000,00
5	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	Penyekatan Ruangan	2018	119.297.000,00
6	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	Konblok Parkiran	2018	29.831.000,00
7	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	Ruang Arsip	2019	95.403.000,00
8	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	Ruang Kerja Pegawai	2019	118.966.000,00
9	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	Ruang Rapat	2018	49.134.000,00
10	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	Ruang Kerja Pegawai	2020	98.814.000,00

11	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	Penyekatan Ruang	2020	59.950.000,00
Total				1.021.212.114,00

Mutasi atas Aset tetap Lainnya adalah sebagai berikut :

Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	862.448.114,00
Mutasi tambah:	
Pembelian	158.764.000,00
Mutasi kurang:	
-	0,00
Saldo per 31 Desember 2020	1.021.212.114,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020	0,00
Nilai Buku per 31 Desember 2020	1.021.212.114,00

Penjelasan atas mutasi

Mutasi Tambah

1. Pembelian sebesar Rp158.764.000,00 diperoleh dari belanja modal lainnya sebesar Rp173.764.000,00 adalah Belanja Partisi Ruang dan Renovasi Lahan Parkir Bawaslu Kabupaten Belitung Timur sebesar Rp59.950.000,00 dan Belanja Renovasi Ruang Kerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sebesar Rp 98.814.000,00

Terdapat selisih antara Belanja Modal Lainnya dan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp15.000.000,00 yang merupakan Belanja Konsultan untuk Buku Kinerja yang tidak dapat di input pada Simak BMN karena tidak termasuk aset dan dikoreksi ke akun Beban Jasa Konsultan.

C.8 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp6.499.682.768,
00*

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan Tahun 2019 adalah masing-masing sebesar Rp6.499.682.768,00 dan Rp4.861.538.707,00. Rincian Akumulasi yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019*

No	Aset Tetap	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	6.492.339.687,00	4.855.672.040,00
2	Gedung dan Bangunan	943.080,00	0,00
3	Jalan. Irigasi. dan Jaringan	6.400.001,00	5.866.667,00
4	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Total		6.499.682.768,00	4.861.538.707,00

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	10.136.683.860,00	6.492.339.687,00	3.644.344.173,00
2	Gedung dan Bangunan	94.308.000,00	943.080,00	93.364.920,00
3	Jalan. Irigasi dan Jaringan	8.000.000,00	6.400.001,00	1.599.999,00
4	Aset Tetap Lainnya	1.021.212.114,00	0,00	1.021.212.114,00
Total		11.260.203.974,00	6.499.682.768,00	4.760.521.206,00

C.9 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud Rp27.000.000,00

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki. tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Nilai Perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2020 dan Tahun 2019 adalah Rp27.000.000,00 dan Rp27.000.000,00. Adapun saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Aset Tak berwujud TA 2020

No	Nama	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1	Aplikasi Penatausahaan Kearsipan	6.000.000,00	6.000.000,00
2	Aplikasi SARAB Panwas Kab/Kota	21.000.000,00	21.000.000,00
Total		27.000.000,00	27.000.000,00

Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	27.000.000,00
Mutasi tambah:	
Mutasi kurang:	.
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	27.000.000,00
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2020	(24.375.000,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2020	2.625.000,00

C.11 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp24.375.000,00*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dan Tahun 2019 adalah masing-masing Rp24.375.000,00 dan Rp18.375.000,00. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	27.000.000,00	(24.375.000,00)	2.625.000,00
Jumlah	27.000.000,00	(24.375.000,00)	2.625.000,00

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

*Utang kepada
pihak ketiga
Rp13.284.050,00*

C.11 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan Tahun 2019 masing-masing sebesar Rp13.284.050,00 dan Rp11.910.772,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

*Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan
2019*

No	Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1	Belanja Barang yang masih harus di bayar	13.284.050,00	11.910.772,00
Total		13.284.050,00	11.910.772,00

Rincian Belanja Barang yang masih harus dibayar per 31 desember 2020 adalah sebesar Rp13.284.050,00 adalah sebagai berikut :

*Rincian Belanja Barang yang masih Harus dibayar per 31 Desember
2020*

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Beban Langganan Telepon	254.045,00
2	Beban Langganan Listrik	5.978.922,00
3	Beban Jasa Lainnya	6.874.858,00
4	Beban Langganan Air	176.225,00
Total		13.284.050,00

*Ekuitas
Rp9.351.434.041,
00*

C.14 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp9.351.434.041,00 dan Rp7.352.351.790,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset sebesar Rp9.364.718.091,00 dan kewajiban sebesar Rp13.284.050,00. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan

*Pendapatan
PNBPRp47.5
05.911,00*

Jumlah Pendapatan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan Tahun 2019 adalah masing-masing sebesar Rp47.505.911,00 dan Rp1.902.223,00 dengan rincian sebagai berikut :

Perbandingan Rincian Pendapatan per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)	% Naik (Turun)
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	47.505.911,00	1.902.223,00	2397,39
Total	47.505.911,00	1.902.223,00	2397,39

Penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut :

1. Realisasi Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) per 31 Desember sebesar Rp47.505.911,00 terdiri dari :

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2020

No	Kabupaten	Ntpn	Tanggal Setor	Nominal (Rp)	Jumlah Per Kabupaten (RP)
1	Kabupaten Bangka Selatan	0F6878N3DE4M26S7	17-Feb-20	333.567,00	40.623.114,00
3	Kabupaten Bangka Selatan	DE79F61QTUJO2QSE	22-Apr-20	3.083.590,00	
4	Kabupaten Bangka Selatan	4E7081JNEPNQ1S3B	22-Apr-20	2.395.678,00	
5	Kabupaten Bangka Selatan	4AA7C1JNEPT5QOB8	9-Jun-20	1.989.868,00	
6	Kabupaten Bangka Selatan	AEFFD61QTUP3RNO5	9-Jun-20	2.130.081,00	
7	Kabupaten Bangka Selatan	A0E011JNEQ697B0T	10-Sep-20	15.919.708,00	
8	Kabupaten Bangka Selatan	16E2B3CIEFJU7P03	7-Dec-20	14.770.622,00	
10	Kabupaten Bangka Tengah	D0C637QLTJULUDNU	30-Jun-20	1.423.340,00	
11	Kabupaten Bangka Tengah	B4D767QLTJULUF7E	30-Jun-20	4.580.818,00	
12	Kabupaten Belitung Timur	DB1888N3DE4LUUI3	17-Feb-20	1.874,00	1.874,00
Jasa Giro tahun 2020 yang disetor 2020					46.629.146,00
1	Kabupaten Bangka Selatan	1BF4C7QLTSP32E4G	5-Jan-21	876.765,00	876.765,00
Jasa Giro 2020 yang disetor 2021					876.765,00
Total					47.505.911,00

Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa terdapat perbedaan jumlah Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp48.531.369,00 dibandingkan jumlah Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) pada Laporan Operasional per 31 Desember 2020 sebesar Rp47.505.911,00. perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya pendapatan jasa giro tahun 2019 yang disetorkan di tahun 2020 sebesar Rp1.902.223,00 dan pendapatan jasa giro tahun 2020 yang disetorkan pada tahun 2021 sebesar Rp876.765,00 lebih jelas mutasi pendapatan yang diperoleh adalah sebagai berikut :

Mutasi Tambah :	
Pendapatan Jasa lembaga Keuangan (Jasa Giro) LRA	48.531.369,00
Pendapatan Jasa Giro yang belum disetor ke kas negara	876.765,00
Jumlah Mutasi Tambah	49.408.134,00
Mutasi Kurang	
Jurnal Balik Atas Penyetoran Pendapatan Jasa Giro Tahun Anggaran Yang Lalu	(1.902.223,00)
Jumlah Mutasi Kurang	(1.902.223,00)
Jumlah Pendapatan Per 31 Desember 2020	47.505.911,00

D.2 Beban Pegawai

*Beban
Pegawai
Rp5.233.674.8
22,00*

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi. baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara. Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2020 dan Tahun 2019 adalah masing-masing sebesar Rp5.233.674.822,00 dan Rp5.533.724.171,00 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2020 dan Tahun 2019

URAIAN	REALISASI TA 2020	REALISASI TA 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	722.522.812,00	410.737.921,00	75,91
Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	4.039.129.700,00	4.729.219.800,00	(14,59)
Beban Uang Lembur	38.090.000,00	46.406.800,00	(17,92)
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	433.932.310,00	347.359.650,00	24,92
Total	5.233.674.822,00	5.533.724.171,00	(5,42)

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat terjadi penurunan belanja pegawai Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 jika dibandingkan dengan 2019 sebesar 5.42 persen hal ini disebabkan pada tahun 2020 tidak dibayarkannya Tunjangan Hari Raya Ketua. Anggota Baswaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan tidak dibayarkannya komponen Tunjangan Kinerja pada pembayaran THR sebagai akibat adanya perubahan kebijakan pemerintah terkait Pandemi COVID-19.

D.3 Beban Persediaan

*Beban
Persediaan
Rp
381.370.882,0
0*

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai. Beban Persediaan pada 31 Desember 2020 dan Tahun 2019 adalah masing-masing sebesar Rp381.370.882,00 dan Rp267.259.150,00 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2020 dan Tahun 2019

URAIAN	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	381.370.882,00	267.259.150,00	42,70
Total	381.370.882,00	267.259.150,00	42,70

Beban persediaan mengalami kenaikan 42,70 pesen dari tahun 2019 hal ini karena adanya penerimaan hibah masuk Alat Pelindung Diri dari Pemerintah Daerah dalam rangka penanganan Pandemi COVID-19. Terdapat perbedaan jumlah realisasi Belanja Barang Persediaan dibandingkan dengan jumlah

beban persediaan per 31 Desember 2020. hasil mutasi beban persediaan adalah sebagai berikut :

Mutasi Tambah:	
Saldo Awal	69.666.850,00
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	252.365.901,00
Belanja Barang Persediaan- Penanganan Pandemi Covid 19	10.754.000,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	17.683.300,00
Hibah (Masuk) Persediaan lainnya- Penanganan Pandemi Covid 19	109.442.039,00
Jumlah Mutasi Tambah	459.912.090,00
Mutasi Kurang:	
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	(8.874.358,00)
Beban Persediaan Rusak Usang	(69.666.850,00)
Sisa Persediaan per 31 Desember 2020	0,00
Barang Konsumsi	0,00
Persediaan Lainnya	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	(78.541.208,00)
Jumlah Beban Persediaan per 30 September 2020	381.370.882,00

Hibah Masuk Barang Konsumsi – Penanganan Pandemi Covid-19 berupa Alat Pelindung Diri yang berasal dari Pemerintah Daerah dengan rincian sebagai berikut :

Kabupaten	Nama Barang	Jumlah (Rp)
Bangka Selatan	Masker Jenis Tali	2.168.000,00
	Asam Askorbat (Vitamin C) tablet 50 mg	1.100.000,00
	Hand Sanitizer	10.000.000,00
	Handscoon Steril 7.5	4.831.200,00
	Baju hazmat/coverall	11.000.000,00
Bangka Barat	Masker	3.740.000,00
	sarung tangan	790.400,00
	Vitamin	1.977.000,00
	Hand Sanitizer	779.418,00
	Masker	2.330.000,00

	Face Shield	8.650.000,00
	sarung tangan	6.000.000,00
	Hand Sanitizer	40.775.000,00
	Sarung Tangan	2.840.000,00
Bangka Tengah	Hand. Masker Medis. Sarung Tangan dan Vitamin	3.111.021,00
	Handsanitizer. Sarung Tangan. Masker. dan Face Shield	9.350.000,00
Total		109.442.039,00

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Rp 25.700.047.719,00

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Jumlah Beban Barang dan Jasa pada 31 Desember 2020 dan Tahun 2019 adalah masing-masing sebesar Rp25.700.047.719,00 dan Rp29.096.515.253,00 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI TA 2020	REALISASI TA 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	13.448.156.772,00	13.398.090.073,00	0,37
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	7.644.200,00	0,00	-
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	648.150.000,00	651.790.000,00	(0,56)
Beban Barang Operasional Lainnya	586.501.500,00	740.962.200,00	(20,85)
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	577.079.369,00	0,00	-
Beban Bahan	3.237.113.360,00	5.738.622.200,00	(43,59)
Beban Honor Output Kegiatan	2.151.020.000,00	1.231.705.000,00	74,64
Beban Barang Non Operasional Lainnya	0,00	277.778.800,00	-
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	32.854.000,00	0,00	-
Beban Langganan Listrik	244.730.252,00	264.257.028,00	(7,39)
Beban Langganan Telepon	29.023.500,00	64.629.152,00	(55,09)
Beban Langganan Air	14.400.364,00	8.860.564,00	62,52
Beban Jasa Pos dan Giro	0,00	2.750.250,00	-
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	42.075.533,00	0,00	-
Beban Jasa Konsultan	15.000.000,00	0,00	-

Beban Sewa	3.741.770.833,00	4.643.690.967,00	(19,42)
Beban Jasa Profesi	313.285.000,00	1.698.181.000,00	(81,55)
Beban Jasa Lainnya	306.049.036,00	375.198.019,00	(18,43)
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	305.194.000,00	0,00	-
Total	25.700.047.719,00	29.096.515.253,00	(11,67)

Penurunan Beban Barang dan Jasa pada tahun 2020 terjadi karena adanya Pandemi COVID-19 sehingga terdapat kebijakan pemotongan anggaran.

1. Beban Barang Operasional – Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp577.079.369,00 digunakan untuk :
 - a. Pengadaan masker/hand sanitizer diperuntukkan bagi kegiatan tertentu (tidak memenuhi kriteria persediaan);
 - b. Biaya penyemprotan disinfektan di area kantor yang dilaksanakan swakelola;
 - c. Pengadaan lisensi aplikasi video conference sampai dengan 1 tahun;
 - d. Pembelian vitamin dan penambah daya tahan tubuh.
2. Belanja Barang Non Operasional – Penanganan Pandemi Covid-19 sebesar Rp32.854.000,00 digunakan untuk :
 - a. Biaya komunikasi dalam bentuk pulsa/paket data internet untuk kegiatan/diklat;
 - b. Pengadaan APD/alat uji medis/rapid test dan sejenisnya yang tidak memenuhi kriteria aset tetap dan persediaan.
3. Belanja Jasa – Penanganan Pandemi Covid-19 sebesar Rp305.194.000,00 digunakan untuk :
 - a. Pembayaran biaya penyemprotan disinfektan dan pelaksanaan rapid test yang menggunakan pihak ketiga

Terdapat perbedaan jumlah Realisasi Beban Barang dan Jasa bila dibandingkan jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2020 berikut penjelasan mutasi Beban Barang dan Jasa sebagai berikut :

Mutasi Tambah:	
Belanja Beban dan Jasa (LRA)	24.473.249.108,00
Beban Listrik Desember 2020 di Bayarkan 2021	5.978.922,00
Beban Telepon Desember 2020 di Bayarkan 2021	254.045,00
Beban Air Desember 2020 di Bayarkan 2021	176.225,00
Beban Internet Desember 2020 di Bayarkan 2021	6.874.858,00
Koreksi Jurnal Beban Jasa Konsultasi	15.000.000,00
Penambahan Beban Sewa atas Sewa Dibayar Dimuka Tahun Anggaran Yang Lalu	1.390.781.333,00
Jumlah Mutasi Tambah	25.892.314.491,00
Mutasi Kurang:	
Jurnal Balik atas Beban Air Tahun yang Lalu	(122.000,00)
Jurnal Balik atas Beban Listrik Tahun yang Lalu	(6.887.402,00)
Jurnal Balik atas Beban Internet Tahun yang Lalu	(4.901.370,00)
Penambahan Beban Sewa atas Sewa Dibayar Dimuka Tahun 2021	(180.356.000,00)
Jumlah Mutasi Kurang	(192.266.772,00)
Jumlah Beban Persediaan per 30 September 2020	25.700.047.719,00

Perbedaan Realisasi Belanja Barang dan Jasa dengan Beban Barang dan Jasa terdapat pada akun sebagai berikut :

1. Beban langganan Listrik pada LO sebesar Rp244.730.252,00 sedangkan pada LRA sebesar Rp245.638.732,00 perbedaan tersebut dikarenakan ada pencatatan Beban Listrik untuk tagihan bulan desember sebesar Rp5.978.922,00 dan jurnal balik atas Beban Listrik tahun 2019 sebesar Rp6.887.402,00
2. Beban Telepon pada LO sebesar Rp29.023.500,00 sedangkan pada LRA sebesar Rp28.769.455,00 perbedaan tersebut dikarenakan ada pencatatan Beban Telepon Desember sebesar Rp254.045,00
3. Beban langganan Air pada LO sebesar Rp14.400.364,00 sedangkan pada LRA sebesar Rp14.346.139,00 perbedaan ini disebabkan oleh adanya pencatatan Beban Langganan Air sebesar Rp176.225,00 dan jurnal balik atas beban langganan air tahun 2019 sebesar Rp122.000,00

4. Beban Sewa pada LO sebesar Rp3.741.770.833,00 sedangkan pada LRA sebesar Rp2.531.345.500,00 terdapat perbedaan yang disebabkan oleh pencatatan sewa dibayar dimuka untuk tahun 2021 sebesar Rp180.356.000,00 dan pencatatan Sewa dibayar dimuka tahun 2019 sebesar Rp1.390.781.333,00
5. Beban Jasa Lainnya pada LO sebesar Rp29.023.500,00 sedangkan pada LRA sebesar Rp304.075.548,00 perbedaan tersebut dikarenakan ada pencatatan Beban Jasa Lainnya yang merupakan tagihan internet tahun 2020 sebesar Rp6.874.858,00 dan jurnal baik atas Beban Jasa Lainnya tahun 2019 sebesar Rp4.901.370,00
6. Beban Jasa Konsultasi pada LO sebesar Rp15.000.000,00 sedangkan pada LRA sebesar Rp 0,00 hal ini disebabkan jurnal koreksi atas Jasa Konsultasi pembuatan Buku Riset

Beban

Pemeliharaan

Rp

934.770.074,0

0

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan 31 Desember 2020 dan Tahun 2019 adalah masing-masing sebesar Rp934.770.074,00 dan Rp829.381.402,00 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2020 dan Tahun 2019

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2020	TH 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	173.863.800,00	89.338.500,00	94,61
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	760.906.274,00	740.042.902,00	2,82
Jumlah	934.770.074,00	829.381.402,00	12,71

Peningkatan Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan karena adanya penyiapan ruangan untuk Penambahan Pejabat struktural dengan berlakunya SOTK baru ditahun 2020.

Beban

Perjalanan

Dinas

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas. fungsi. dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2020 dan Tahun 2019 adalah masing-masing sebesar

Rp9.926.050.754,00 dan Rp16.195.348.784,00 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2020 dan Tahun 2019

URAIAN	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	3.117.432.103,00	5.477.711.884,00	(43,00)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.123.432.500,00	2.491.651.700,00	(15,00)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4.507.194.603,00	7.206.754.200,00	(37,00)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	177.991.548,00	1.019.231.000,00	(83,00)
Total	9.926.050.754,00	16.195.348.784,00	(39,00)

Penurunan Beban Perjalanan Dinas ini dikarenakan adanya Pembatasan kegiatan tatap muka seperti supervisi, monitoring dan pelaksanaan pertemuan di hotel sebagai akibat dari Pandemi Covid-19.

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp1.644.144.061,00

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2020 dan Tahun 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.644.144.061,00 dan Rp1.688.419.862,00 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2020 dan Tahun 2019

URAIAN	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.636.667.647,00	1.681.136.528,00	(2,65)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	943.080,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	533.334,00	533.334,00	0,00
Jumlah Penyusutan	1.638.144.061,00	1.681.669.862,00	0,00
Beban Amortisasi Software	6.000.000,00	6.750.000,00	(11,11)
Jumlah Amortisasi	6.000.000,00	6.750.000,00	(11,11)
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.644.144.061,00	1.688.419.862,00	(2,62)

D.8 Kegiatan Non Operasional

Kegiatan Non Operasional Rp13.474.909,00

Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp13.474.909,00 dan Rp11.752.990,00 dengan rincian sebagai berikut :

Perbandingan Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)	% Naik (Turun)
Pendapatan pemindahtanganan BMN Lainnya	2.159.999,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	0,00	1.800.000,00	0,00
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	2.159.999,00	1.800.000,00	20,00
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	45.223.000,00	0,00	0,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	17.683.300,00	14.630.100,00	20,87
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional lainnya	62.906.300,00	14.630.100,00	329,98
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	(8.874.358,00)	(4.677.110,00)	89,74
Beban Persediaan Rusak/Usang	(69.666.850,00)	0,00	0,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional lainnya	(78.541.208,00)	(4.677.110,00)	1.579,27
Jumlah Surplus Kegiatan Non Operasional	(13.474.909,00)	11.752.990,00	(214,65)

Defisit dari kegiatan non operasional per 31 Desember 2020 sebesar Rp13.474.909,00 diperoleh dari :

1. Mutasi Tambah :

- a. Pendapatan dari pemindahtanganan BMN Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.159.999,00 merupakan pendapatan dari lelang penjualan Sisa buku saksi yang telah rusak berat/usang.
- b. Pendapatan Perolehan Aset Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp45.223.000,00 merupakan aset yang perolehannya berasal dari pemberian (*reward*) Bank hasil Beauty Contest tempat penampungan rekening giro Bendahara Pengeluaran dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Perolehan Lainnya per 31 Desember 2020

Kabupaten	Uraian	Jumlah (Rp)
Bangka Barat	Sepeda Motor	17.223.000,00
Bangka Tengah	Sepeda Motor	17.050.000,00
Belitung Timur	AC	10.950.000,00
Total		45.223.000,00

b. Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp17.683.300,00

3. **Mutasi Kurang:**

- a. Beban Penyesuaian Nilai Persediaan sebesar Rp8.874.358,00
- b. Beban Persediaan Rusak/Usang sebesar Rp69.666.850,00 merupakan Sisa Buku Saksi Parpol pengadaan tahun 2019 yang tidak bisa dipergunakan kembali (Sudah dilakukan lelang dan terjual).

D.9 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa Rincian Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing Rp0,00 dan Rp0,00.
Rp0,00

Surplus/ **D.10 Surplus/Defisit LO**
Defisit LO

Rp43.786.027 Defisit LO per 31 Desember 2020 dan tahun 2019 masing-masing sebesar Rp43.786.027.310,00 dan Rp53.596.993.409,00
.310,00

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp7.352.351.790,00

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2020 dan Tahun 2019 adalah masing-masing sebesar Rp7.352.351.790,00 dan Rp9.204.341.810,00

Defisit LO
Rp43.786.027.310,00

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp43.786.027.310,00 dan Rp53.596.993.409,00 Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional. surplus/defisit kegiatan non operasional. dan pos luar biasa.

Transaksi Antar Entitas
Rp
45.785.109.561,00

E.3 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp45.785.109.561,00 dan Rp51.745.003.389,00 Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL. antar KL. antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Ditagihkan ke Entitas Lain	20.104.111.432,00	50.088.366.389,00
Diterima dari Entitas Lain	(50.691.368,00)	(1.800.000,00)
Pengesahan Hibah Langsung	25.731.689.497,00	1.658.437.000,00
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	0,00	0,00
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	0,00	0,00
Transfer Masuk	0,00	0,00
Transfer Keluar	0,00	0,00
Total	45.785.109.561,00	51.745.003.389,00

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada Periode hingga 31 Desember 2020. DDEL sebesar minus Rp50.691.368,00 merupakan penpadatan PNPB tahun 2020. terdiri dari:

Rincian Diterima dari Entitas Lain

Diterima dari Entitas Lain	Jumlah (Rp)
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	2.159.999,00
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	48.531.369,00
Jumlah	50.691.368,00

Sedangkan Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) per 31 Desember 2020 sebesar Rp20.104.111.432,00 merupakan belanja netto yang berasal dari anggaran rupiah murni. terdiri dari:

Rincian Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain	Jumlah (Rp)
Belanja Pegawai	5.233.674.822,00
Belanja Barang	14.242.745.610,00
Belanja Modal	627.691.000,00
Total	20.104.111.432,00

2. Pengesahan Hibah Langsung / Pengesahan Pengembalian

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang, maupun jasa. sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 adalah Sebesar Rp25.731.689.497,00 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Pengesahan Hibah Langsung per 31 Desember 2020

No	Jenis Hibah	Jumlah (Rp)
1	Hibah Langsung dalam bentuk Uang	25.592.049.458,00
2	Hibah Langsung dalam bentuk Barang	139.640.039,00
Total		25.731.689.497,00

lebih lanjut rincian atas pengesahan hibah langsung dalam bentuk kas dan barang adalah sebagai berikut :

Rincian Pengesahan Hibah Langsung dalam bentuk Uang per 31 Desember 2020

No	Kabupaten	Jumlah (Rp)
1	Bawaslu Kab. Bangka Tengah	7.800.000.000,00
2	Bawaslu Kab. Bangka Selatan	6.639.104.000,00
3	Bawaslu Kab. Bangka Barat	5.456.190.000,00
4	Bawaslu Kab. Belitung Timur	5.696.755.458,00
Total		25.592.049.458,00

Rincian Pengesahan Hibah Langsung dalam bentuk Barang per 31 Desember 2020

No	Kabupaten	Hibah Barang (APD) Persediaan (Rp)	Hibah Barang Peralatan & Mesin (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Bawaslu Kab. Bangka Tengah	12.461.021,00	10.200.000,00	22.661.021,00
2	Bawaslu Kab. Bangka Selatan	29.099.200,00	19.998.000,00	49.097.200,00
3	Bawaslu Kab. Bangka Barat	67.881.818,00	0,00	67.881.818,00
Total		109.442.039,00	30.198.000,00	139.640.039,00

E.5 Penjelasan mengenai Kenaikan/Penurunan Ekuitas

Kenaikan Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.999.082.251,00 dan minus Rp1.851.990.020,00 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Kenaikan/Penurunan Ekuitas per 31 Desember 2020

Kenaikan/Penurunan Ekuitas	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Surplus/Defisit LO	(43.786.027.310,00)	(53.596.993.409,00)
Koreksi atas Reklasifikasi	0,00	0,00
Koreksi Nilai Aset Non revaluasi	0,00	0,00
Lain-Lain	0,00	0,00
Transaksi Antar Entitas	45.785.109.561,00	51.745.003.389,00
Total	1.999.082.251,00	(1.851.990.020,00)

Ekuitas Akhir
Rp9.351.434.
041,00

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2020 dan Tahun 2019 adalah masing-masing sebesar Rp9.351.434.041,00 dan Rp7.352.351.790,00. Nilai Ekuitas Akhir merupakan akumulasi nilai ekuitas awal sebesar Rp7.352.351.790,00 ditambah kenaikan ekuitas sebesar Rp1.999.082.251,00 sehingga nilai ekuitas akhir adalah sebesar Rp9.351.434.041,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

1. Kejadian Penting Setelah tanggal Neraca

Berdasarkan SK Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0300/Bawaslu/SJ/PL.08/VIII/2020 tentang Perubahan Kondisi Barang Milik Negara Berupa Persediaan Pada Bawaslu Provinsi Seluruh Indonesia. Bawaslu Provinsi Seluruh Indonesia mengubah status sisa persediaan buku saksi parpol tersebut menjadi persediaan usang dan melakukan pengejuan lelang kepada KPKNL. Proses tindak lanjut tersebut telah dilaksanakan dan persediaan buku saksi parpol tersebut telah berhasil dilelang pada bulan November dan hasil lelang nya telah disetorkan ke kas negara dan diakui sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp2.159.999,00 dengan no NTPN 593382G4UKUTG7GQ tanggal 18 November.

2. Perubahan SOTK

Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu dan secara fungsional bertanggung jawab kepada ketua Bawaslu Provinsi. Sekretariat Bawaslu Provinsi dipimpin oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi. Sesuai Perbawaslu nomor 7 Tahun 2019 Sekretariat Bawaslu Provinsi Bangka Belitung termasuk kedalam klasifikasi kelas B. Sekretariat Bawaslu Provinsi Kelas B terdiri atas :

- a. Bagian Administrasi;
- b. Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat; dan
- c. Bagian Penanganan Pelanggaran. Penyelesaian Sengketa Proses. dan Hukum.

3. Penjelasan Mengenai Rekening aktif yang digunakan

a. Rekening Pemerintah

Untuk rekening yang masih aktif dan digunakan sampai dengan periode 31 Desember 2020 adalah 8 Rekening untuk pengelolaan dana APBN dan 4 Rekening untuk pengelolaan dana Hibah PILKADA dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Rekening Aktif Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung

No	Nomor Rekening	Nama Rekening	Cabang	Keterangan
1	169-00-6666555-2	BPG 015 Bawaslu Prov. Babel	Mandiri KK Pangkalpinang City Hall	Rekening APBN
2	169-00-0087049-0	BPP 015 Panwaslu Bangka Tengah	Mandiri KCP Koba	Rekening APBN
3	169-00-1520171-5	BPP 015 Panwaslu Bangka Selatan	Mandiri KCP Toboali	Rekening APBN
4	169-00-0087158-9	BPP 015 Panwaslu Bangka Barat	Mandiri KCP Mentok	Rekening APBN
5	169-00-0087139-9	BPP 015 Panwaslu Bangka	Mandiri KCP Sungailiat	Rekening APBN
6	169-00-0086832-0	BPP 015 Panwaslu Pangkalpinang	Mandiri KK Pangkalpinang City Hall	Rekening APBN
7	169-00-0087196-9	BPP 015 Panwaslu Belitung	Mandiri KC Tanjung Pandan	Rekening APBN
8	169-00-0087195-1	BPP 015 Panwaslu Belitung Timur	Mandiri Cabang 16905	Rekening APBN
9	209001000249300	RPL 015 PDHL BAWASLU	BRI KCP Mentok	Rekening Dana Hibah PILKADA Bangka Barat
10	1553011152	RPL 015 PDHL BAWASLU	SUMSEL BABEL KC Toboali	Rekening Dana Hibah PILKADA Bangka Selatan
11	219401000182308	RPL 015 PDHL BAWASLU	KCP Koba	Rekening Dana Hibah PILKADA Bangka Tengah
12	209301000275303	RPL 015 PDHL BAWASLU	KCP Manggar	Rekening Dana Hibah PILKADA Belitung Timur

b. Pejabat Perbendaharaan

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/I/2020 tanggal 2 Januari tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna

Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 007/BAWASLU-BB/HK.01.01/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Bendahara Pengeluaran Pembantu. Pejabat Perbendaharaan Sekretariat Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung sebelum perubahan :

Kuasa Pengguna Anggaran : Ari Susanto

Bendahara Pengeluaran : Fitri Widiastuti

Pejabat Perbendaharaan Setelah Perubahan :

Kuasa Pengguna Anggaran : Roy M Siagian

Bendahara Pengeluaran : Febriyanti

c. Pejabat Administrator

Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1483/BAWASLU/SJ/KP.04.00/XI/2020 tanggal 27 November 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Pejabat Administrator Sebelum Perubahan :

Koordinator Sekretariat Bawaslu : Indra Gunawan
Kab. Bangka Tengah

Pejabat Administrator Setelah Perubahan :

Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. : Win Iskandar
Bangka Tengah

4. Hibah

Sampai dengan 31 Desember 2020 Hibah Uang dari 4 Pemerintah Daerah yang melaksanakan PILKADA telah diterima seluruhnya oleh Bawaslu Kabupaten sesuai dengan nilai yang diperjanjikan dalam NPHD dengan rincian sebagai Berikut :

Kabupaten	NPHD	Penerimaan Hibah 2019 (Rp)	Penerimaan Hibah 2020 (Rp)	Total Penerimaan Hibah (Rp)
Bawaslu Kab. Bangka Barat	5.756.190.000,00	300.000.000,00	5.456.190.000,00	5.756.190.000,00
Bawaslu Kab. Bangka Tengah	8.344.200.000,00	544.200.000,00	7.800.000.000,00	8.344.200.000,00
Bawaslu Kab. Bangka Selatan	7.215.020.000,00	575.916.000,00	6.639.104.000,00	7.215.020.000,00
Bawaslu Kab. Belitung Timur	5.935.076.458,00	238.321.000,00	5.696.755.458,00	5.935.076.458,00
Total	2.7250.486.458,00	165.8437.000,00	25.592.049.458,00	27.250.486.458,00

5. Dampak Pandemi Covid-19

Sehubungan dengan surat dari Sekretaris Jenderal Bawaslu nomor 00081/BAWASLU/SJ/PR.03.01/IV/2020 tanggal 9 April 2020 perihal Tindak Lanjut Perpres 54 Tahun 2020 yaitu adanya pemotongan Anggaran DIPA Bawaslu Provinsi Berdasarkan Perpres 54 Tahun 2020 dari DIPA sebelumnya sebesar Rp32.010.984.000,00 menjadi Rp18.277.621.000,00, dalam penyusunan RKA K/L telah memperhitungkan Penyediaan masker, hand sanitizer dan penyemprotan disinfektan serta penyediaan suplemen dalam rangka penanganan wabah Covid-19, pengadaan belanja Modal di prioritaskan untuk pengadaan thermoGun dalam rangka penanganan wabah Covid-19 dan pelaksanaan kegiatan paket meeting yang bersifat Koordinasi dan Kerja Teknis dapat dilaksanakan setelah wabah Covid-19 berakhir dan menunggu arahan lebih lanjut dari Bawaslu.

6. Lain-Lain

Sesuai dengan Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 0016/KU.02/SJ/01/2021 tanggal 7 Januari 2021 tentang Pelaksanaan Rekonsiliasi. Penyusunan dan Penyampaian

Laporan Keuangan Tahun 2020 Tingkat UAKPA, serta Penilaian PIPK. Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan Penilaian Akhir PIPK dan ditetapkan pada tanggal 15 Januari hasil Penilaian akhir PIPK adalah Efektif sesuai dengan Surat Keputusan pada Lampiran IV.

